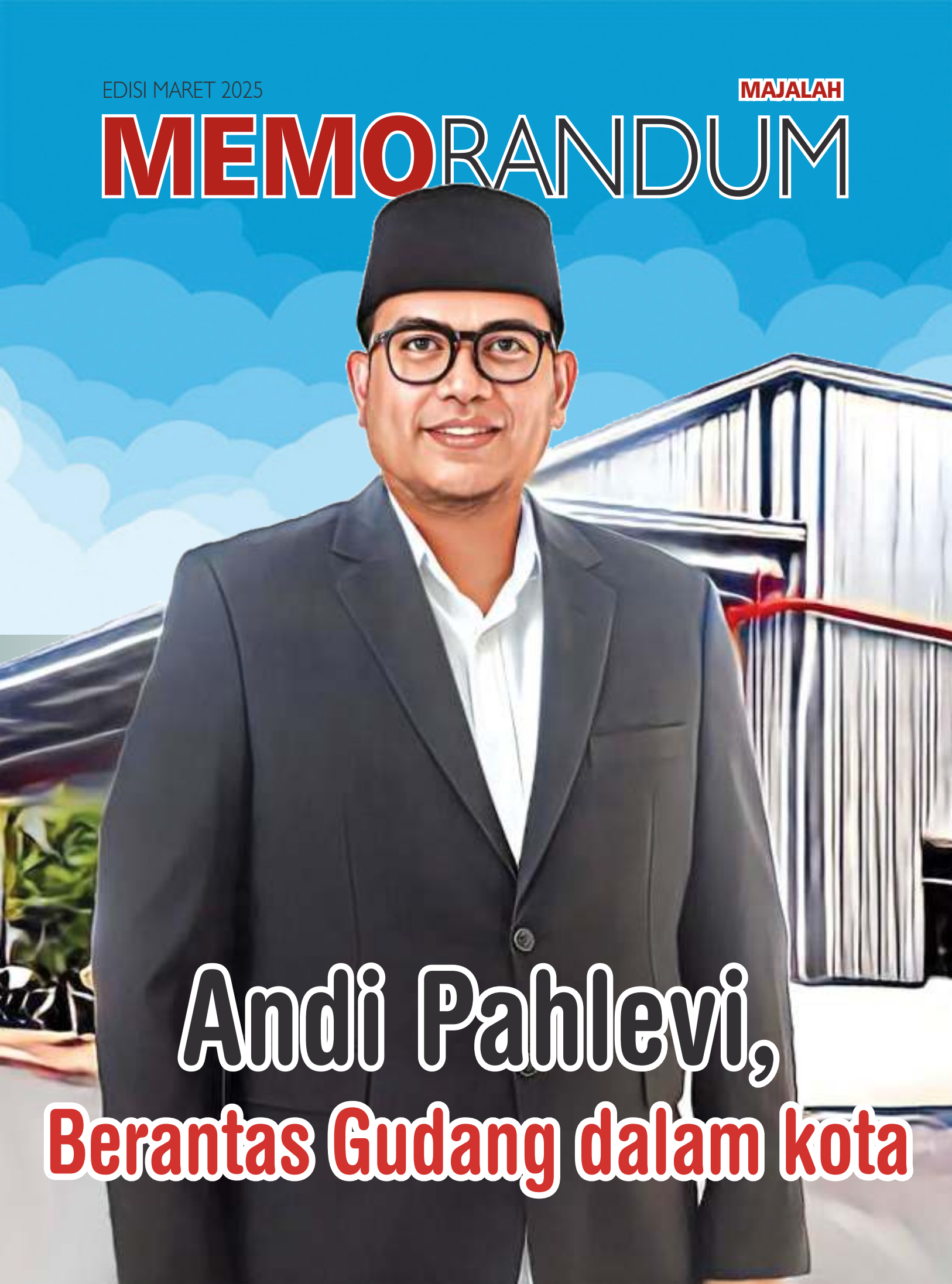
EDISI MARET 2025

MAJALAH

MEMORANDUM



Andi Pahlevi, Berantas Gudang dalam kota



PANTAU. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat menghadiri Gerakan Pangan Murah yang berlangsung di Kantor Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, pada Rabu (26/3).

Pemkot Stabilisasi Harga Pangan

Gelar Pasar Murah di Kampung Buyang

MAKASSAR, MEMORANDUM – Badan Pangan Nasional bersa-ma Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pemerintah Kota Makassar menggelar Gerakan Pangan Murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pan-gan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2025.

Gerakan Pangan Murah diselenggarakan serentak di 24 kabu-paten/kota se-Sulsel pada 26–27 Maret 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, melalui sambungan virtual yang terhubung ke seluruh titik pelaksanaan di daerah.

Di Kota Makassar, kegiatan ini berlangsung di Kantor Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, pada Rabu (26/3).Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut hadir dalam kegiatan ini, didampingi oleh Pj Sekda Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri menyapa warga dan memastikan harga komoditas pangan yang dijual sesuai dengan harga subsidi yang telah ditetapkan.Munafri mengatakan ini adalah bentuk sinergitas pemerintah pusat, provinsi, dan kota dalam memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat memper-oleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah menjelang Lebaran. Ini adalah bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan," ujarnya.

Munafri menambahkan kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya dalam menghadapi lonjakan harga yang sering terjadi menjelang HBKN.

"Pemerintah kota akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, salah satunya melalui intervensi harga pangan seperti ini," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak yang turut serta dalam kegiatan ini.

"Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama menjelang momen-momen penting seperti Idulfitri," tambahnya.

Diketahui, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan har-ga pasar. Beberapa komoditas yang tersedia di antaranya dag-ing ayam, beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang, cabai, tepung terigu, serta berbagai komoditas pangan lainnya. Selain itu, terdapat juga produk hasil UMKM yang ikut serta dalam bazar pangan murah ini. (*)

BPJS Kesehatan Siapkan Layanan Gratis bagi Pemudik

MAKASSAR, MEMORANDUM – Se-bagai wujud dukungan terhadap kenyamanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun masyarakat luas yang men-jalani mudik Lebaran di tahun 2025, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di beberapa titik padat pemudik.

Para pemudik bisa mengakses layanan tersebut di Posko Mudik BPJS Kesehatan yang berlokasi di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Ungaran Km 429A, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan MerakBanten, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka dan Posko Arus Balik terdapat di Rest Area Heritage Banjaratma KM 260B Brebes.

"Di masa mudik Lebaran, BPJS Kesehatan senantiasa rutin menghadirkan Posko mudik yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik. Tahun ini, Posko mudik dapat dikunjungi oleh pemudik sejak tanggal 26–30 Maret 2025. Selain itu, kami juga membuka Posko Mudik BPJS Kesehatan saat arus balik di Rest Area Ban-jaratma KM 260B, Brebes pada 5 – 7 April 2025. Selain layanan pemeriksaan kesehatan gratis, kami juga menyediakan fasilitas pijat relaksasi bagi pemudik," kata Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal saat meresmikan Posko Mudik BPJS Kesehatan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Rabu (26/3).

Afdal menjelaskan, bahwa Badan Kebijakan Transporta-si Kementerian Perhubungan telah memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran tahun 2025 diperkirakan 146,48 juta pemudik atau sebesar 52% dari jumlah penduduk. Jumlah tersebut ini turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Meski demikian, BPJS Kesehatan tetap mengambil peran dalam membantu menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui Posko Mudik BPJS Kesehatan sehingga bisa menjaga kesehatan para pemudik dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan berkendara.

Selain bisa memanfaatkan layanan konsultasi dan pemer-iksaan kesehatan gratis, para pemudik bisa memanfaatkan beberapa layanan lainnya di Posko Mudik BPJS Kesehatan, seperti fasilitas relaksasi, penyediaan obat-obatan, pemberian tindakan sederhana yang bersifat emergency hingga pemberian rujukan bila diperlukan. Selain itu, para pemudik yang singgah di posko tersebut juga bisa menikmati takjil gratis yang sudah disediakan.

"Para pemudik yang singgah di Posko Mudik BPJS Kesehatan bisa memanfaatkan layanan tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya. Untuk itu, kami mengimbau kepada para pemudik agar jangan sungkan untuk singgah dan memanfaatkan layanan yang telah kami sediakan. Posko Mudik BPJS Kese-hatan akan beroperasi selama 24 jam penuh, terbagi atas tiga tim yang bertugas secara bergantian setiap delapan jam. Masingmasing tim tersebut terdiri atas dua orang petugas BPJS Kesehatan, satu orang dokter, dua orang paramedis dan satu pengemudi ambulans," kata Afdal. (*)



DPRD Dorong Penguatan UMKM dan Pembangunan Wilayah

MAKASSAR, MEMORANDUM – Pembangunan berbasis wilayah jadi atensi DPRD Makassar. Juga penguatan UMKM.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Makassar turut menghadiri kegiatan tersebut, di Hotel Claro, Makassar, Kamis, 13 Maret 2025.

Di antaranya Ketua DPRD Makassar Supratman dan Wakil Ketua DPRD Makassar Anwar Faruq. Dalam kesempatan ini, DPRD Makassar menyampaikan sejumlah pokok pikiran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan.

Wakil Ketua DPRD Makassar Anwar Faruq yang mewakili Ketua DPRD dalam sambutannya, menegaskan pembangunan wilayah harus menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup perbaikan jalan, drainase, serta pengembangan transportasi publik yang nyaman dan layak.

Di sektor pendidikan, DPRD mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk penguatan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian peningkatan kompetensi guru, serta dukungan terhadap pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.

Sementara itu, di sektor kesehatan, DPRD menekankan pentingnya peningkatan layanan puskesmas dan rumah sakit daerah. Ini mencakup penambahan fasilitas medis yang lebih memadai untuk masyarakat.

Dalam aspek ekonomi, DPRD menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM melalui kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil. "Akses permodalan harus dipermudah, keterampilan pelaku usaha perlu ditingkatkan, dan ekosistem ekonomi digital harus diperkuat agar UMKM bisa berkembang," kata Anwar.

DPRD juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis lingkungan dan ketahanan bencana. Menurut Anwar, tantangan perubahan iklim harus diantisipasi dengan program pembangunan ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang efektif, penyediaan ruang terbuka hijau, serta mitigasi bencana seperti banjir dan longsor.

Tak hanya itu, peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan juga menjadi sorotan. DPRD mendorong digitalisasi layanan publik serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

"Musrenbang ini adalah momen penting untuk merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran. Kami berharap seluruh masukan dari masyarakat dapat diakomodasi dengan baik dalam rencana pembangunan Kota Makassar," ujar Anwar.

Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan agar sejalan dengan visi pembangunan Kota Makassar yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

"Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat. Semoga upaya yang kita lakukan hari ini menjadi langkah awal menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," tutupnya.

Terpisah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. "Musrenbang ini bukan sekadar forum perencanaan, tetapi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan menciptakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa RKPD 2026 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 agar dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

"Program yang kita susun harus mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Di akhir sambutannya, Munafri mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. "Dengan semangat gotong royong, kita dapat menyusun rencana pembangunan yang efektif dan efisien serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha," tutupnya.

(**)



MUSRENBANG KOTA. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 di Hotel Claro, Makassar, Kamis, 13 Maret 2025. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Makassar terlibat dalam kegiatan itu.







Komisi III Apresiasi Pejabat TNI

Tindak Personel Kasus Way Kanan

JAKARTA, MEMORANDUM- Komisi III DPR mengapresiasi langkah cepat TNI dalam menetapkan dua oknum personelnya sebagai tersangka dalam kasus penembakan anggota Polri di Way Kanan, Lampung.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menilai tindakan tegas ini membuktikan bahwa reformasi internal TNI berjalan maksimal dan prinsip persamaan di muka hukum benar-benar ditegakkan.

"TNI sudah menunjukkan sikapnya sebagai yang sangat menghargai azas persamaan di muka hukum. Ini adalah bukti bahwa reformasi internal TNI sudah berjalan maksimal," ujar Habiburokhman dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @habiburokhmanjkttimur, Selasa (25/3).

Habiburokhman menegaskan bahwa tindakan kedua oknum tersebut bukan hanya mence-markan nama baik institusi TNI, tetapi juga mengkhianati kerja keras anggota TNI lainnya yang bertugas di lapangan.

Oleh karena itu, ia mendesak agar pelaku penembakan dihukum seberat-beratnya dan dipecat dari institusi."Kerja keras anggota TNI menjalankan tugasnya di tempat-tempat sulit menjadi tercemar garagara ulah si oknum ini.

Kami berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya dan dipecat dari institusi TNI," tegasnya.Komisi III DPR juga meminta agar kasus ini ditangani secara transparan dan terbuka, se-bagaimana kasus penembakan bos rental di Banten.

Habibu-rokhman berharap proses hu-kum dapat berjalan tanpa inter-vensi, memastikan keadilan bagi para korban dan keluarganya. Seperti diketahui, kasus ini bermula dari penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan yang berujung pada insiden penembakan hingga me-newaskan tiga anggota Polri.

Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) Mayjen TNI Eka Wijaya Per-mana menjelaskan bahwa dua oknum personel TNI AD, Kopda Basarsyah (B) dan Peltu Yohanes Lubis (YL), telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Keduanya sudah jadi tersangka. Untuk yang menembak itu dilakukan Kopda B, yang kemudian membuang senjata usai kejadian," ujar Mayjen Eka dalam konferensi pers di Mapolda Lampung kemarin, Selasa (25/3).

Menurutnya, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Polda Lampung dan Kodam II/Sriwijaya melakukan investigasi mendalam. **(*/RM)**



Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.



Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengatasi darurat sampah

MPR Dorong RUU Soal Pengelolaan Sampah

JAKARTA, MEMORANDUM - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan perlunya dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Eddy, kegentingan sampah saat ini membutuhkan regulasi yang lebih relevan dan komprehensif.

"Dari 56 juta ton sampah yang dihasilkan, yang terkelola hanya 40 persen. Situasi darurat sampah ini menyebabkan bukan hanya masalah lingkungan tapi juga masalah kesehatan dan lebih dari itu masalah sosial yang berkepanjangan," kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (25/3).

Hal ini disampaikan Eddy saat menerima audiensi komunitas muda peduli lingkungan Plastic Guardians di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/3).

"Perlu ada regulasi yang lebih disempurnakan lagi terkait pengelolaan sampah," lanjutnya. Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, poin-poin penting dalam Revisi UU Pengelolaan Sampah antara lain komitmen besaran APBN dan APBD untuk pengelo-laan sampah.

Dia menyampaikan data dari Kemendagri menyebutkan saat ini rata-rata besaran APBD untuk penanganan sampah rata-rata 0,4 sampai 0,7 persen dari APBD."Situasi ini menyebabkan pen-anganan sampah tidak menjadi prioritas, dan karena itu masalahnya semakin berlarut-larut dari tahun ke tahun," ungkap Eddy.

Waketum PAN ini menambah-kan poin penting lainnya yang harus menjadi perhatian dalam revisi UU Pengelolaan Sampah adalah mempercepat proses pembangunan infrastruktur fasilitas pengelolaan sampah dan juga pembangkit listrik tena-ga sampah (waste to energy).

Hal itu, kata Eddy lagi, termasuk dalam hal ini masalah perizinan, skema penyewaan aset pemda, tipping fee, insen-tif fiskal, sampai harga jual listrik ke PLN dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

"Kami terus mendorong evalu-asi terhadap regulasi agar semakin banyak lagi investor tertarik bermitra dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sam-pah menjadi energi," tegasnya.Eddy berpendapat semakin baik nilai keekonomiannya, investor juga akan tertarik.

"Jika investasi masuk maka bermanfaat untuk lapangan pekerjaan, pendapatan daerah hingga menjadi sumber energi terbarukan," kata Anggota Komisi XII DPR yang membidangi ESDM, lingkungan hidup, hilirisasi, dan investasi ini.

Eddy juga memberikan apresiasi dan dukungannya kepada Plastic Guardians yang fokus gerakannya adalah membersih-kan, mengangkut dan mengelola sampah di Sungai Citarum Jawa Barat. (*)

Senayan Dorong Pemerintah Perbaiki Komunikasi ke Publik

JAKARTA, MEMORANDUM - Senayan mendorong Pemerintah memperbaiki komunikasi publik ke masyarakat dalam menyampai-kan isu-isu, kebijakan dan ca-paian Pemerintah sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto.



Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengatakan, komunikasi publik yang dibangun mesti bisa lebih terarah, terpadu, dan ada empati.

Komunikasi ini bukan hanya terkait pesan yang akan disampaikan ke masyarakat, tetapi juga kaitannya dengan keterpaduan informasi.

"Dengan adanya Lembaga Komunikasi Presiden, harusnya komunikasi yang dibangun bisa lebih terarah, terpadu dan yang paling inti itu komunikasi publiknya itu harus ada empati," kata Irawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3).

Dia menyoroti kisruh pern-yataan yang dilontarkan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi terkait teror yang dialami wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica.

Pernyataan Hasan dinilai tidak sepantasnya dilontarkan oleh pejabat Pemerintah."Itu kan tidak punya empati terhadap masyarakat, khususnya terhadap kebebasan pers. Harusnya dia punya empati," ucapnya.

Politisi muda Fraksi Golkar ini menilai, Kantor Komunikasi Presiden sebagai corong informasi formal dari Pemerintah harusnya lebih berhati-hati dalam melontarkan pernyataan yang terkait dengan hal-hal yang sen-sitif di publik.

Apalagi, Kantor Komunikasi Presiden ini punya peran dan tugas seperti koordinator untuk juru bicara Pemerintah dan ke-menterian/lembaga. Sehingga harusnya intens dengan setiap kementerian, badan, lembaga dalam memberikan informasi.

Jadi, harusnya komunikasi Pemerintah ini lebih bagus kare-na ditangani satu kelembagaan tersendiri. Mereka bisa fokus terhadap tugas pokok dan fung-sinya dibanding yang lalu-lalu.

"Artinya, ada penguatan kelembagaan karena Presiden Prabowo menganggap bahwa komunikasi Presiden, Istana ter-hadap publik itu penting. Makan-ya dikuatkan kelembagaannya," ungkapnya.

Dengan adanya penguatan ini, Kantor Komunikasi Presiden dapat memperkuat akses terhadap diseminasi informasi hingga akses informasi dari istana atau kebijakan-kebijakan Pemerintah secara umum. Jadi, ketika ada isu yang menyimpang dan menyudutkan Pemerintah, Kantor Komunikasi Presiden bisa meluruskan isu tersebut.

"Misalnya terkait revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, macam-macam. Jadi harusnya mereka memberikan penjelasan itu tidak hanya terh-adap apa yang ditanyakan. Teta-pi juga apa yang dikerjakan oleh Pemerintah, Presiden dan itu harus jelas," sarannya.

Untuk itu, dia berharap besar agar pesan Presiden Prabowo terkait pentingnya perbaikan komunikasi publik ini dapat benar-benar dijalankan. Ke depan, Kantor Komunikasi Presiden dapat merespons pertanyaan publik dengan baik, jelas dan komprehensif.

"Itu juga bisa meringankan tugas dan beban kami anggota parlemen. Kami, partai-partai pendukung pemerintah karena kalau komunikasinya tidak pas, kami yang harus menjelaskan itu kepada masyarakat. Padahal kalau penjelasan Pemerintah itu jelas, bagus, saya kira gampang diterima di mata publik," jelasnya.

Hal senada dilontarkan Ketua DPR Puan Maharani. Dia meminta Pemerintah dan jajarannya untuk memperbaiki komunikasi yang baik kepada rakyat.

Dia pun mendukung instruksi Presiden Prabowo agar seluruh Kabinet Merah Putih dapat memperbaiki komunikasi agar rakyat dapat lebih mudah mema-hami kebijakan Pemerintah. (*)

Legislator Puji Lukman Edy

Gercep Tindaklanjuti Keluhan Karyawan Hakaaston

JAKARTA, MEMORANDUM- Sebanyak 20 orang perwakilan karyawan PT Hakaaston, anak perusahaan BUMN Hutama Karya (HK), melakukan audensi ke anggota Komisi IX DPR yang diwakili Irma Suryani Chaniago, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (24/3/2025).

Mereka datang didampingi Ketua Umum Serikat Aspirasi Indonesia Sumirah.Sebanyak 20 orang ini awalnya ada pekerja PT JJL (Tol Lingkar Luar Jakarta) yang kemudian dialihkan ke PT Hakaaston.

Irma Surya menjelaskan, sebanyak 59 orang karyawan diterpa isu akan terkena penutusan hubungan kerja (PHK) karena tidak diikutsertakan dalam cek kesehatan tahunan sebagaimana karyawan yang akan tetap lanjut kontrak.

Sementara, dalam perjanji-an antara pekerja JJL dengan HK waktu peralihan, mereka mempekerjakan mereka sampai usia pensiun.

"Kecuali jika kinerja mereka dianggap tidak baik, tentu hal ini harus melalui proses penilaian KPI (Key Performance Indicator)," terang Irma, dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

Irma langsung menindaklan-juti aduan karyawan Hakaaston ini dengan melapor ke Komisaris PT HK Lukman Edy dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Alhamdulillah laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Bapak Lukman Edy," terang Irma.

Hakaaston merupakan lini bisnis utama sebagai jasa operator dan maintenance jalan tol. Salah satu ruas yang dikelola Hakaaston adalah ruas tol JORR.

Pegawai pengelola ruas tol JORR merupakan mantan Jasamarga yang diangkat menjadi pegawai kontrak Hakaaston sebanyak 235 orang. Pada April 2025, kontrak kerja pegawai tersebut akan habis.

Dalam rangka perpanjangan kontrak, terdapat 59 orang dari 235 karyawan tersebut yang berkinerja tidak baik sehingga dipertimbangkan untuk tidak diperpanjang.Irma menjelaskan, hasil tindak lanjut yang dilakukan Lukman Edy cukup menggembirakan 59 karyawan itu.

Hakaaston akan mengevaluasi perpanjangan kontrak terhadap mereka dengan catatan bisa memperbaiki kinerjanya sehingga tidak men-imbulkan dampak negatif ke kar-yawan lain.

"Dengan komitment kedua pihak, maka tidak perlu lagi ada pengakhiran kontrak," tutur Irma.

Solisinya ditargetkan bisa terselesaikan sebelum kontrak karyawan tersebut habis di April 2025.

"Atas komitmen tegas komisaris PT HK, Bapak Lukman Edy, saya selalu Anggota Komisi IX DPR memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada kinerja, komitmen, dan keberpihakan beliau dalam menjaga marwah BUMN (HK) di tengah gelombang PHK di Tanah Air," terang Irma. **(*/RM)**



Komisi D DPRD Makassar RDP Bahas Isu PHK Massal

MAKASSAR, MEMORANDUM- Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, memimpin jalannya rapat dengan didampingi oleh Sekretaris Komisi, Dr. Fahrizal, serta anggota komisi lainnya H. Muchlis, Yulius Patandianan, H. Meinsani Kecca, dan Odhika Calira. Pertemuan ini juga melibatkan masukan dari Pengurus Ormas Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan dan Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM) yang menyampaikan kepnihatinannya terhadap PHK sepihak yang dilakukan perusahaan. RDP ini diharapkan dapat menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dan mendorong pihak perusahaan untuk bertindak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. **(**)**























Dewan Makassar Sorot Adendum PT MTIR

RAPAT. Momen Komisi B DPRD Makassar menggelar RDP dengan PD Pasar. Salah satu pembahasannya adalah menyoroti addendum perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dan PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) terkait pengelolaan Pasar Sentral.

MAKASSAR, MEMORANDUM - Anggota DPRD Makassar Komisi B, Basdir, menyoroti addendum perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dan PT Melati Tung-gal Inti Raya (MTIR) terkait pengelolaan Pasar Sentral.

Ia menilai perubahan perjanjian ini merugikan pemerintah kota serta tidak menguntungkan pedagang kecil.

Menurut Basdir, kerja sama yang diteken pada 2017 dilakukan tanpa keterbukaan dan tanpa sepengetahuan Wali Kota saat itu, padahal peraturan daerah mewajibkan keterlibatan semua pihak terkait.

"Dulu perjanjiannya dibuat begitu saja tanpa transparansi. Ini jadi pertanyaan besar," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pasar Sentral tindak lanjutkan dari Sidak, Selasa (25/3/2025).

Basdir juga mengritik kebijakan pemindahan pedagang ke dalam Pasar Sentral yang inilainya sebagai bentuk pemaksaan. Ia menyoroti keterbatasan ruang di pasar, yang hanya memiliki luas 120 x 100 meter, sehingga tidak mampu menampung seluruh pedagang.

Selain itu, berdasarkan SK 91 yang mencatat jumlah kios sebanyak 700 unit, jumlah tersebut kemudian ditambah menjadi 900 unit.

Namun, hingga saat ini, tingkat keterisian kios masih di bawah 50 persen.Ukuran pasar terlalu sempit, ada yang 1 Kali 1 inikan seukuran WC, ada cuma 2x2 atau 2x3 meter. Kalau saya dipaksa pun, tidak mungkin mau jualan di tempat sesempit itu," cetusnya.

Basdir juga menyoroti setoran parkir dari pengelola pasar yang dinilai tidak wajar. Dalam kondisi normal, setoran parkir di lokasi lain bisa mencapai Rp15 juta per bulan, sedangkan dalam dua ta-hun terakhir, setoran dari Pasar Sentral hanya berkisar Rp2 juta per bulan."Ini aneh.

Harusnya ada setoran harian yang jelas. Kalau dua tahun ini cuma Rp2 juta per bulan, jelas ini merugikan pemerintah kota. Padahal, kita juga ingin memberdayakan juru parkir di sana," ujarnya.

Basdir juga mengkhawatirkan dampak kebijakan pengelolaan Pasar Sentral terhadap pedagang kecil di sekitar area tersebut. Menurutnya, perubahan ini telah mengurangi daya tarik pasar, yang sebelumnya strategis, menjadi kurang diminati oleh pembeli.

"Kasihan mereka. Pasar yang dulu strategis sekarang jadi begini. Kalau ini terus berlanjut, siapa yang mau bertanggung jawab?" katanya.

Ia berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera mengevaluasi perjanjian ini dan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan pasar berpihak kepada kepentingan pedagang kecil, bukan hanya menguntungkan pihak tertentuKetua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyatakan bahwa pihaknya memanggil PD Pasar untuk RDP guna membahas permasalahan di berbagai pasar di Kota Makassar.

Ia juga menegaskan pihak pengembang, sebagai mitra ketiga, akan dipanggil pada pertemuan selanjutnya untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

"Kita akan menemukan win-win solution bagi semua pihak. Jika ada permintaan dari PD Pasar terkait addendum, kita bisa rekomendasikan, sambil terus berkoordinasi dengan Wali Kota yang baru," ungkapnya.

Ismail juga menyoroti permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab direksi saat ini,tetapi juga merupakan dampak dari keputusan yang diambil oleh Direktur Utama PD Pasar sebelumnya, yang dianggap menjalankan kebijakan tanpa koordinasi yang baik.

"Permasalahan ini menjadi catatan buruk bagi PD Pasar. Keputusankeputusan penting sebelumnya hanya diambil oleh Dirut tanpa koordinasi dengan direksi lainnya, sehingga menyebabkan kekacauan seperti sekarang," tutupnya.

Ismail, menegaskan pihakn-ya mengawal permasalahan ini secara ketat. Ia menyampaikan bahwa pihak MTIR sebenarnya sudah dipanggil dalam RDP kali ini, namun mereka meminta penundaan karena telah memasuki masa cuti Lebaran.

"Saya kawal betul ini. Sebe-narnya pihak Melati sudah kita panggil, tapi mereka minta untuk dibatalkan hari ini karena sudah cuti Lebaran. Mungkin setelah Lebaran baru kita panggil lagi," jelasnya.

Ismail juga menegaskan dalam pertemuan berikutnya, DPRD akan mempertemukan kedua belah pihak, yakni PD Pasar dan PT MTIR, guna mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

"Setelah itu, kita panggil mereka berdua. Kita cari titik temu. Komisi B tidak ingin merugikan pemerintah kota, tetapi juga tidak ingin merugikan pihak pengembang, dalam hal ini PT Melati," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan yang tidak adil terhadap investor juga bisa berdampak buruk bagi iklim investasi di Makassar.

"Kalau kebijakan ini tidak menguntungkan investor, nanti tidak ada lagi yang mau berinvestasi di Makassar. Tapi pedagang juga tidak boleh dirugikan. InsyaAllah, kami akan mencari solusi terbaik," pungkasnya. (*)



Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengusulkan KPK

Sahroni Usul KPK Buat Aturan Baru

Tahan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN

JAKARTA, MEMORANDUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat aturan tentang hukuman bagi pejabat yang ogah menyampaikan laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Hal itu disampaikan Sahroni menanggapi data yang dirilis KPK bahwa angka penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN masih tinggi. Tercatat, per 20 Maret 2025 ada 50.369 penyelenggara negara belum menyerahkan LHKPN periodik 2024.

Selain itu, pejabat negara yang menyerahkan LHKPN baru mencapai 87,92 persen. Adapun batas akhir pelaporan LHKPN periodik 2024 tertanggal 31 Maret 2025 nanti.

Sahroni pun menyoroti kedisiplinan pejabat dalam menyetor LHKPN. Dia menilai KPK harus memiliki sistem tegas untuk mem-buat pelaporan LHKPN lebih tertib.

"Saya kira KPK harus bekerja sama dengan instansi-instansi, untuk membuat sistem punishment," kata Sahroni dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).

Dia menyarankan, bagi penyelenggara negara yang tidak disiplin atau sengaja tidak mau menyetor LHKPN sampai batas waktu tertentu, bakal ada hukuman.

"Misalnya gaji enggak turun atau ditahan promosi jabatannya," ujar Sahroni.

Dia menyarankan hal itu agar para penyelenggara negara lebih taat terhadap ketentuan yang ada.

Terlebih lagi, LHKPN juga merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.Selain itu, LHKPN juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat.

"Jadi, kalau ada yang sudah diingetin berulangulang tetapi masih enggan melapor, ya, berarti patut dicurigai ada sesuatu. Karena kalau bersih, kan, tinggal lapor saja apa susahnya? kata Sahroni. **(*/jpnn)**

Komisi III DPR SIAP BAHAS RUU KHUP

JAKARTA, MEMORANDUM - Komisi III DPR RI dipastikan siap jika diminta pimpinan DPR RI untuk membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP).

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengatakan, pengesahan RUU KUHAP harus dilakukan sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Sehingga, kata dia, jika peng-esahan RUU KUHAP lebih cepat maka akan menjadi lebih baik.

"KUHAP ini harus dimulai sebelum berlakunya KUHP jadi makin cepat makin baik," kata Wayan kepada wartawan, Rabu 26 Maret 2025.

Namun demikian, Wayan menegaskan bahwa cepatnya pembahasan RUU KUHAP tetap harus mengindahkan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Tapi cepat tidak boleh mengabaikan kualitas, cepat tidak boleh mengurangi sekecil apapun peran masyarakat karena kita membicarakan kepentingan mereka," pungkas politikus PDIP ini.

Pembahasan RUU KHUP ini muncul sejumlah isu diduga dihembuskan untuk melemahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sedang gencar membidik kasus-kasus korupsi kakap.

Pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan mengatakan, isu yang berkembang antara lain menyasar Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jampidsus Febrie Adriansyah, termasuk revisi KUHAP yang disebut meng-hapus kewenangan jaksa dalam menyidik perkara korupsi.

"Kewenangan Kejaksaan sidik tindak pidana korupsi (tipikor) tidak boleh dipreteli," kata Ismail dalam keterangannya, Jumat 21 Maret 2025.

Menurut peneliti pada Pusat Hukum BRIN ini, keresahan publik cukup beralasan mengingat saat ini Kejagung menjadi tumpuan harapan penegakan hukum.

"Publik tidak ingin Kejagung bernasib sama seperti KPK yang dilemahkan melalui revisi UU," kata Ismail.

Dalam draf revisi KUHAP Pasal 6 tentang penyidik berikut penjelasannya, jaksa menjadi "penyidik tertentu" yang kewenangannya terbatas menyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat. Ke depan jaksa tidak lagi berwenang menyidik kasus tindak pidana korupsi.

Meski belakangan Komisi III DPR RI selaku inisiator revisi UU meluruskan informasi yang beredar bahwa draf tersebut bukanlah hasil akhir.

Namun upaya membatasi atau menghapus kewenangan jaksa tetap saja tidak bisa diabaikan begitu saja.Apalagi sejauh ini ada dua draf dengan substansi berbeda serta membuat publik bingung draf mana yang dibahas oleh DPR.

"Saya kira prosesnya perlu lebih transparan di mana publik bisa akses dan terlibat secara partisipatif.

Mungkin saja pikiran untuk membatasi kewenangan jaksa memang ada sehingga memicu reaksi dari banyak kalangan," kata Ismail.

Ismail mengatakan, jika draf yang membatasi kewenangan jaksa benar adanya, maka harus dikaji kembali.

"Karena korupsi masih menjadi musuh bersama, sehingga perlu banyak energi untuk memberantasnya. enyidik Kejaksaan masih sangat diperlukan untuk menyidik tipikor," pungkas Is-mail. **(*/rmol)**





Buka Puasa Bersama, Ketua DPRD Makassar Berkomitmen Dukung Renovasi Masjid Al Kautsar

MAKASSAR, MEMORANDUM- Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman berkomitmen akan perjuangan pembangunan masjid Al Kautsar Pesona Prima Griya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Hal ini disampaikan saat Supratman menghadiri buka puasa bersama dan penyerahan 500 paket sembako di pelataran Masjid Al-Kautsar, Minggu (9/2/2025).

"Saya upayakan secara maksimal (membantu penganggaran)," kata Supratman.

Untuk nominalnya, Supratman tidak bisa menyebutkan karena diketahui saat ini pemerintah Kota Makassar menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Walau sebelumnya, Masjid Al Kautsar sempat mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Makassar pada tahun lalu sebesar, Rp100 juta.

"Kita tahu 50 persen anggaran dipangkas untuk Makan Bergizi Gratis, tapi saya upayakan secara maksimal untuk membantu," ujar Supratman.

Politisi NasDem ini juga menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada pemandi jenazah yang telah berdedikasi melayani masyarakat.

"Kami juga menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada para pemandu jenazah yang telah berdedikasi melayani masyarakat," sebutnya.

Legislator Daerah Pemilihan Manggala - Panakkukang ini harapannya agar kegiatan semacam ini dapat mempererat ukhuwah antar warga.

"Semoga kebersamaan ini semakin mempererat ukhuwah dan membawa keberkahan bagi kita semua," terangnya.

Supratman juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini, "Mari terus menebar kebaikan dan saling berbagi di bulan penuh rahmat ini," tutupnya.

Sementara penceramah buka puasa, Ustadz Andi Akmal Al Bone sempat menyentil Supratman agar bantuan untuk Masjid Al Kautsar segera cair.

"Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah ting tong (transferan dana bantuan masuk ke) rekening masjid. Mudah-mudahan sebelum Lebaran, sudah berdering SMS banking Masjid Al Kautsar," singkatnya.

Buka puasa berlangsung meriah walau hujan mengguyur wilayah Makassar.

Acara buka puasa ini terlaksana berkat dukungan Direktur Medso Care, Reza Pahlevi sekaligus tuan rumah, serta kolaborasi bersama Camat, Kapolsek, Danramil, Lurah, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. (**)







Program CKG Dipastikan Merata di Seluruh Indonesia

AKARTA, MEMORANDUM - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan agar Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di desa dan pelosok.

Ibas berkomitmen terus mengawal program ini, agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Ibas ketika ikut cek tensi dan meninjau langsung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Desa Panggung, Kabupaten Magetan.

Kegiatan ini berlangsung dalam acara reses sekaligus Silaturahmi Kebangsaan bertajuk 'Kawal Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)', Selasa (25/03/25).

Dalam sambutannya, Ibas menegaskan komitmennya terhadap program kesehatan."Saya datang ke desa ini, ingin memastikan program yang kami perjuangkan di tingkat pusat, tidak hanya kami sebagai wakil rakyat dari Partai Demokrat, tapi juga teman-teman dari tingkat Kabupaten, bahwa Masyarakat kita hari ini harus tetap sehat, betul?" ujar Ibas.

"Kami mengawal, memastikan agar program cek kesehatan gratis benar-benar bisa dirasakan oleh Masyarakat yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Desa Panggung. Kalau kita sehat, Insya Allah kita panjang usia, betul? Insya Allah kita bisa terus berpikir yang terbaik untuk desa kita, kabupaten kita, dan Indonesia tercinta," ujar Ibas.

"Kami juga ingin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya juga terhindar dari penyakit-pernyakit seperti sakit gula atau diabetes, asam urat, dan penyakit hipertensi yang biasanya turunan, atau dari konsumsi garam yang berlebihan," ujar Ibas.

Lebih lanjut Ibas menyatakan dukungannya terhadap program kesehatan pemerintah, bahwa pengecekan kesehatan gratis yang diberikan oleh pemerintahan Prabowo mesti sama-sama didukung dan dikawal.

"Masyarakat kita lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secepat mungkin, dan kita mengantisipasi sebelum terjadinya sakit atau datangnya penyakit badan dan tubuh kita secara rutin dicek," ujar Ibas.

Dan, program kesehatan gratis ini berlaku untuk semuanya, termasuk ketika hari ulang tahun sedoyo," ungkapnya. Dalam kesempatan ini, Ibas juga menekankan pentingnya memperhatikan kesehatan ibu hamil dan balita sebagai generasi penerus bangsa.

"Untuk anak-anak dan balita, pastikan dipantau terus tumbuh kembangnya, termasuk peningkatan gizinya melalui program makan bergizi gratis. Sementara bagi calon ibu muda, pemeriksaan berkala sangat penting karena kesehatan mereka menentukan kualitas generasi berikutnya," ujarnya.

Ibas mengingatkan bahwa investasi di sektor kesehatan ibu dan anak akan berdampak jangka panjang.

"Ketika ibu sehat dan balita tercukupi gizinya, maka kita sesungguhnya sedang membangun fondasi SDM unggul untuk Indonesia maju. Salah satunya adanya melalui Posyandu dan Puskesmas yang terdata dan dilaksanakan setiap bulan, seperti di Desa Panggung ini," katanya.



Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono di acara reses sekaligus Silaturahmi Kebangsaan bertajuk;Kawal Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Selasa (25/3/2025).

Edhie Baskoro anggota DPR RI dapil Jatim VII tersebut, selain meninjau Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga datang untuk mengawal langsung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ibas menyampaikan apresiasinya atas progres program bedah rumah yang telah menjangkau 1.080 penerima manfaat di Kabupaten Magetan.

"Alhamdulillah tadi, kami bertemu Mbok Darmi dan Mas Rokif, salah satu penerima manfaat dari bedah rumah yang kami perjuangkan di Kabupaten Magetan sebanyak 1.080 rumah. Dan insya Allah, sekali lagi, kita harus sama-sama komitmen agar program tersebut betul-betul berlanjut," ungkapnya.

"Karena tidak semua mendapatkan kesempatan, masih banyak yang memerlukan bantuan yang lebih besar untuk itu, rumah layak, Nyaman, dan sehat " tambah Ibas.

"Saya juga ingin memastikan kawal bedah rumah ini selesai dan kedepan tetap terawat dengan baik sehingga keluarga menjadi lebih sehat dan nyaman hidupnya. Di kala musim hujan, kita juga beryukur, terlindungi dari atap yang bocor, dan kamar mandinya juga lebih baik. Pesan saya, mohon untuk benar-benar dirawat, nggih?" lanjutnya.

Sambutan hangat dan rasa syukur pun disampaikan oleh penerima manfaat.

Adapun Acik Maliyani, perawat sekaligus penanggung jawab puskesmas desa, menyampaikan rasa senangnya atas kedatangan Edhie Baskoro.

"Alhamdulillah, senang sekali kami dikunjungi langsung oleh wakil rakyat kami tersayang (DPR RI), Mas Ibas.

PonKesDes ini adalah tempat untuk kami melayani para masyarakat yang periksa kesehatan dan yang sedang sakit; ada pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, jantung, cek gula darah hingga lainnya. Memastikan masyarakat bisa terus sehat, sehingga kami berharap Mas Ibas bisa terus mengawal dan membantu kami," katanya.

Di sisi lain, Dokter Abdulah Karim ketika ditemui Ibas menjelaskan beberapa penyakit yang banyak dikeluhkan masyarakat desa.

"Di desa ini banyak masyarakat yang datang untuk cek tensi dan gula. Kebanyakan sakit yang diderita adalah hipertensi, dan diabetes. Para pasien yang merupakan masyarakat disini, tiap bulan kami lakukan pengecekan dan terus kita melakukan sosialisasi, edukasi dan penanganannya untuk masyarakat," katanya.

Kunjungan ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan Kesehatan dan Gizi Gratis di Magetan. **(*/RM)**



SERAHKAN BANtUAN. Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitas Sosial di Bank Mandiri Cabang Malili, Rabu (26/3/2025)

321 Yatim Piatu Terima Bantuan Atensi

LUWU TIMUR, MEMORANDUM- Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Rehabilitas Sosial Anak menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitas Sosial (ATENSI) kepada 321 anak yatim piatu di Kabupaten Luwu Timur.

Penyerahan bantuan dilaku-kan di Bank Mandiri Cabang Malili, Rabu (26/3/2025) dan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Luwu Timur, Pusp-awati Husler kepada perwakilan penerima bantuan.

Penyerahan bantuan Atensi anak yatim piatu ini bertujuan untuk mendukung pemenuhan hidup layak, agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal dan juga dapat meningkatkan aksesibilitas anak untuk mempertahankan hidupnya.

Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler mengucapkan terima kasih atas kepedulian Kemensos kepada anak-anak yatim piatu di Kabupaten Luwu Timur melalui penyaluran bantuan ini.

"Semoga dengan bantuan ini dapat memberi manfaat kepada seluruh anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya agar bisa tetap tumbuh dan berkembang secara maksimal," kata Wakil Bupati.

Sementara Pendamping Pelaksana Program, Arbin mengatakan, sebanyak 321 anak yatim piatu yang menjadi penerima Bantuan Sosial Atensi di Kabupaten Luwu Timur tahun 2025.

"Bantuan ini berupa nontunai yang disalurkan melalui Bank Mandiri di beberapa titik yaitu Cabang Malili, Sorowako, dan Mangkutana dengan kriteria penerima bantuan harus terdaftar dalam Data Terpadu Keseahteraan Sosial," ungkap Arbin.

Lebih lanjut ia berharap anak yatim piatu yang belum tercover bisa turut memperoleh bantuan yang sama pada penyaluran bantuan tahap selanjutnya.

"Dalam satu tahun akan ada 6 tahap penyaluran, dan ini merupakan penyaluran bantuan tahap pertama yang dilakukan perdua bulan sekali dimana setiap anak menerima bantuan nontunai sebesar empat ratus ribu rupiah pertahapnya," jelas Arbin. (*)

Cakupan Jamsostek Bulukumba Baru Capai 62 Persen

BULUKUMBA, MEMORANDUM - Hingga Maret 2025, cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Kabupaten Bulukumba baru mencapai sekitar 62 persen.

Padahal, untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ), minimal 99,5 persen pekerja harus terlindungi, baik pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bulukumba, Sahid Wahid, menegaskan bahwa UCJ bertujuan melindungi seluruh pekerja dari risiko sosial akibat pekerjaan.

Jika target ini tercapai, Bulukumba berpeluang mendapatkan Paritrana Award, penghargaan tertinggi dari Presiden untuk daerah dengan perlindungan tenaga kerja terbaik.

"Artinya, seluruh pekerja telah terlindungi dari risiko sosial akibat pekerjaan, dan daerah tersebut berhak menerima Paritrana Award sebagai bentuk apresiasi dari Presiden," jelasnya.

Sahid menambahkan bahwa UCJ merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam peningkatan lapangan kerja berkualitas serta penguatan pembangunan sumber daya manusia.

Program ini juga didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek dan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Tata laksananya juga sudah diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025," tambahnya.

Untuk mempercepat penca-paian UCJ, Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus mengupayakan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah meng-gelar rapat verifikasi dan validasi data pekerja rentan guna memastikan mereka terdaftar dalam program Jamsostek.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba, Muhammad Ali Saleng, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pekerja, terutama yang rentan, mendap-atkan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Kita ingin memastikan setiap pekerja di Bulukumba, termasuk yang tergolong rentan, dapat mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi pekerja di segala sektor," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Andi Esfar Tenrisukki, menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data hingga validasi bersama pemerintah setempat. (*)

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

SELAMAT HARI RAYA

IDUL FITRI

1 Syawal 1446 H / 2025 M

Taqabbalallahu Minna
Wa Minkum, Taqabbal Yaa Karim

MINAL AIDIN WAL FAIDZIN
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN



Dr. A. S. CHAIDIR SYAM, S.IP, M.H.
Bupati Maros

A. MUETAZIM MANSYUR, S.T., M.Si.
Wakil Bupati Maros



SALAMAN. Anak asuh panti asuhan Sitti Khadijah bersalaman dengan bupati Pinrang.

Bupati Irwan: Eliminasi TB Jadi Tanggung Jawab Bersama

PINRANG, MEMORANDUM - Bupati Kabupaten Pinrang, Andi Irwan Hamid menegaskan pentingnya peran Forum Stop TB Partnership dalam memastikan efektivitas seluruh program kerja yang diusung dalam upaya eliminasi Tuberkulosis (TB).

Hal ini disam-paikan Bupati Irwan saat menghadiri acara buka puasa bersama anak yatim di Panti Asuhan Sitti Khadijah, belum lama ini.

Bupati Irwan berharap pengurus forum dapat bekerja maksimal demi tercapainya target eliminasi TB di daerah ini.

Ia menekankan bahwa upaya ini sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk men-ciptakan masyarakat yang sehat dan bebas dari penyakit menular seperti Tuberkulosis.

"Pemerintah Kabupaten Pinrang memiliki harapan besar agar daerah ini terbebas dari Tuberkulosis. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan Forum Stop TB Partnership harus bisa menjalankan program dengan optimal," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Irwan juga mengajak seluruh undangan untuk menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momen untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama, terutama anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

"Kebersamaan ini bukan sekadar acara buka puasa, tetapi juga pengingat bagi kita semua untuk terus peduli dan berbagi dengan mereka yang kurang beruntung," tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Pinrang, Hj. A. Sri Widiyati Irwan, Tokoh Muhammadiyah H. Hasyim Padu, jajaran pengurus Forum Stop TB Partnership, pengelola panti asuhan, serta berbagai pihak yang turut mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pinrang.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mencapai eliminasi TB, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam peran serta aktif dalam mendukung program kesehatan dan kesejahteraan. **(Amran)**

Kendaraan Dinas Pemprov Sulbar Hilang

MAMUJU, MEMORANDUM - Wakil Gu-bernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, kembali menegaskan bahwa kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat wajib dikembalikan.

Hal ini disampaikan saat mengikuti buka puasa bersama di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, belum lama ini.

Diketahui, kendaraan dinas roda empat milik Pemprov Sul-bar bertambah dari 24 unit menjadi 38 unit, sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023.

Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, dalam sambutannya menegaskan bahwa tidak peduli pejabatnya siapa, kendaraan dinas tersebut wajib dikembalikan.

Pihaknya pun akan terus melakukan pencarian terhadap aset-aset yang hilang, dan bagi para pelaku akan diberi ganjaran.

Menurut Salim S Mengga, mobil dinas itu merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dijaga dan diper-



Salim S Mengga

tanggungjawabkan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menceritakan sejumlah pengalamannya selama berdinas di militer.

"34 tahun saya menjabat di TNI, tidak ada satu pun inventaris dinas yang dibawa pulang, meski hanya satu buah kursi, apalagi kendaraan dinas yang ingin dibawa pulang,"ujarn, Wagub Sulbar.

"Kita akan terus kejar siapa pun orangnya dan apa pun jabatannya, dia wajib mengembalikan kendaraan dinas,"sambungnya.

Selain itu, dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sulbar juga menyampaikan beberapa program kerjanya ke depan dalam memajukan provinsi Sulawesi Barat yang unggul dan bermartabat. **(Sudirman)**

Memahami Makna dan Pentingnya Silaturahmi

MAKASSAR, MEMORANDUM - Dalam budaya masyarakat Indonesia, tradisi silaturahim saat Idulfitri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perayaan hari kemenangan bagi umat Muslim. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, momen ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk memperkuat ikatan keluarga, mempererat tali persaudaraan, serta saling memaafkan setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh.

Setiap tahun, masyarakat melaksanakan tradisi ini dengan berbagai cara. Salah satu yang paling umum adalah mengun-jungi sanak saudara, tetangga, dan sahabat untuk bersilaturahim secara langsung. Selain itu, banyak yang mengadakan acara halal bihalal, baik di lingkungan keluarga besar, komunitas, hingga di instansi pemerintahan dan perusahaan.

Dalam ajaran Islam, menjaga dan mempererat silaturahim memiliki nilai yang sangat penting. Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menjaga hubungan baik dengan sesama. Bahkan, dalam berbagai hadis disebutkan bahwa silaturahim dapat memperpanjang umur dan mendatangkan berkah dalam kehidupan. Oleh karena itu, tradisi silaturahim saat Idul Fitri bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendalam.

Ingin tahu lebih dalam tentang maknanya? Berikut informasi lengkap yang dirangkum dari berbagai sumber.

Arti Penting Silaturahmi

Pentingnya silaturahmi telah ditegaskan oleh Allah SWT.Bahkan, Allah mengancam akan tidak akan memasukkan siapa saja yang dengan sengaja memu-tus tali silaturahmi. Dalam hadits riwayat Abu Jabir bin Muth'im meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak akan masuk surga orang yang memutus (silaturahmi)." (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa memutus tali silaturahmi adalah hal yang sangat dilarang dalam agama, bahkan ancamannya adalah tidak masuk surga. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memanfaatkan libur lebaran dan Idul Fitri ini untuk kembali menjalin tali silaturahmi dengan keluarga yang sudah lama tidak bertemu.

Selain itu, banyak dalil yan memberikan anjuran untuk men-jaga tali silaturahmi dan manfaat silaturahmi dalam pandangan Islam yang mana penting diket-ahui bagi Umat Islam guna menjaga silaturahmi menjadi bagian dari ketaqwaan kepada Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut,

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. (H.R. Bukhari & Muslim).

Disisi lain, terdapat pula dalam Alqur'an Surah AlBaqarah Ayat 83 mengenai anjuran berbudi baik kepada kerabat, sebagai berikut:

"Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kera-bat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunai-kanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari) kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.(Q.S Al Baqarah: 83)



ILUSTRASI

Makna Silaturahmi saat Lebaran

Tradisi silaturahmi yang menyemarakkan Idulfitri lebih dari sekadar kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.Tradisi ini mengandung makna yang mendalam, baik dalam aspek sosial maupun spiritual bagi umat Muslim. Berikut adalah beberapa nilai penting yang terkandung dalam tradisi ini:

1. Kesempatan Memperbarui Hubungan

Seiring waktu, kesibukan dan perbedaan pendapat seringkali membuat hubungan dengan keluarga, kerabat, atau sahabat menjadi renggang. Idulfitri menjadi momen berharga untuk memperbaiki hubungan yang mungkin telah lama merenggang. Dengan saling berkunjung dan bertukar kabar, kehangatan yang sempat pudar dapat kembali terjalin.

2. Momen Saling Memaafkan

Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, baik disengaja maupun tidak. Oleh karena itu, tradisi silaturahmi di Hari Raya menjadi waktu yang tepat untuk membuka hati dan saling memaafkan. Dengan tulus meminta dan memberi maaf, hati menjadi lebih ringan, dan hubungan sosial kembali harmonis. Sikap saling memaafkan ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Memperkuat Ikatan Kekeluargaan dan Persaudaraan

Silaturahmi juga berfungsi untuk memperkokoh ikatan di antara anggota keluarga dan masyarakat. Pertemuan saat Idul Fitri bukan hanya ajang berbagi cerita, tetapi juga mem-perkuat rasa kebersamaan dan kepedulian satu sama lain. Da-lam suasana penuh kehangatan, setiap individu merasa dihargai dan diakui, sehingga rasa persatuan dalam keluarga dan komunitas semakin erat.

4. Refleksi Spiritual Setelah Berpuasa

Idulfitri adalah momen kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Silaturahmi yang dilakukan setelah Ramadhan bukan hanya tradisi sosial, tetapi juga bentuk refleksi spiritual. Setelah melewati bulan yang penuh pengendalian diri dan peningkatan ibadah, silaturahmi menjadi cara untuk meneruskan nilai-nilai kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan yang telah dilatih selama Ramadhan.

5. Menyebarkan Kebahagiaan dan Berkah

Lebaran identik dengan suasa-na kebahagiaan yang dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik melalui kunjungan langsung, berbagi makanan, memberi hadiah kecil, atau sekadar ucapan penuh kasih, semua itu adalah bentuk kepedulian yang dapat mempererat hubungan sosial. Semangat berbagi ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk saling membantu dan menyebarkan kebaikan.

Panduan Melakukan Silaturahim Lebaran agar Lebih Bermakna

Silaturahmi saat Idulfitri bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi merupakan momen istimewa yang mempererat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan. Agar momen ini semakin berkesan, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memastikan silaturahmi berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar. (*)


DPRD KOTA MAKASSAR
KAREBA PARLEMENTA
Munafri Arifuddin, S.H.
Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E., M.A.P.
SERAP ASPIRASI DEMOKRASI TANGGUH
SUPRATMAN
KETUA DPRD
A. SUHARMIKA
WAKIL KETUA I
ANWAR FARUQ
WAKIL KETUA II
ERIC HORAS
WAKIL KETUA III
H. DAHYAL
MENGUCAPKAN
Selamat Hari Raya
Idul Fitri
1 SYAWAL 1446 H / 2025 M
Minal Aidin Wal Faidzin
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN


DPRD KOTA MAKASSAR
KAREBA PARLEMENTA
Munafri Arifuddin, S.H.
WALIKOTA MAKASSAR
Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E., M.A.P.
WAKIL WALIKOTA MAKASSAR
SERAP ASPIRASI DEMOKRASI TANGGUH
SUPRATMAN
KETUA DPRD
A. SUHARMIKA
WAKIL KETUA I
ANWAR FARUQ
WAKIL KETUA II
ERIC HORAS
WAKIL KETUA III
H. DAHYAL


POLDA
SULAWESI SELATAN
MENGUCAPKAN
Selamat & Sukses
ATAS PELANTIKAN
KAPOLDA SULSEL
IRJEN POL. Drs.
Rusdi Hartono M.Si
Terima Kasih
ATAS PENGABDIAN
IRJEN POL. Yudhiawan S.H., S.I.K.., M.H., M.Si.
Di Bumi Anging Mammiri